

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS INFORMASI
LAPORAN KEUANGAN DAERAH**
(Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Bantul)

Asyiyhatul Latifah
Universitas PGRI Yogyakarta

ABSTRACT

This research aimed to determine the effect of application of government accounting standard, the effect of region's financial accounting system, determine the human resource competencies and internal control system on the quality of local finance report information.

The population in this study were financial department staff (SKPD) of the local government district of Bantul. The sample in this study was 82 respondents of finance accounting in 20 SKPD Bantul. The data were collected by using questionnaires and interview. The data analysis was done by using multiple regression with testing t at a significance level of 5%.

The result of this research shows that application of government accounting standard has a significant effect on the quality of local government financial report information, with the significant value is 0,049. The local financial accounting system, human resource competencies and internal control system has no significant effect on the quality of local finance report information because the significant value > 5%.

Keywords: SAP, region's financial accounting system, human resource competencies, internal control system and the quality of local finance report information.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan sistem pengendalian internal (SPI) terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah.

Populasi penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bantul. Sampel penelitian ini adalah 82 orang responden bagian keuangan di 20 SKPD Kabupaten Bantul. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara. Analisis data menggunakan regresi berganda dengan uji hipotesis (uji t) dengan tingkat signifikansi 5%.

Hasil penelitian membuktikan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,049. Sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi SDM, dan SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah, karena nilai signifikansi > 5%.

Kata kunci: SAP, sistem akuntansi keuangan daerah, SDM, SPI dan kualitas informasi laporan keuangan daerah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan ekonomi setiap Negara membutuhkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik merupakan bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. *Good governance* dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik yaitu transparansi dan

akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal (Andini dan Yusrawati. 2015)

Bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah diatur dalam Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Yensi, dkk. 2014). Menurut Mardiasmo (2004:149) Selain Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yang mempengaruhi informasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah daerah (Rahayu, dkk. 2014).

Proses penyusunan laporan keuangan membutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam bidang akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Terbatasnya pegawai pemerintah yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar. Ketidakpahaman aparatur pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan (Andini dan Yusrawati. 2015).

Menurut Nurillah dan Muid D(2014) Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan serta tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian

internal pada pemerintahan. Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Apabila Pemerintahan memiliki sistem pengendalian internal yang lemah, maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak diyakini kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 informasi laporan keuangan dikatakan berkualitas dan bermanfaat apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Apabila informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan kriteria nilai informasi yang di syaratkan oleh peraturan perundang-undangan akan menimbulkan permasalahan (Yensi, dkk. 2014).

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian dan relevan dengan penelitian ini antara lain: Wati (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Rahayu, dkk (2014) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Ihsanti (2014) membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan daerah, tetapi kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap laporan keuangan daerah. Namun penelitian Yensi, dkk (2014) melakukan penelitian bahwa kompetensi SDM dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan, SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan Hasil penelitian sebelumnya dan masih terbatasnya penelitian di bidang pemerintahan khususnya di Kabupaten Bantul memotivasi peneliti untuk meneliti kembali mengenai pelaporan keuangan pada instansi pemerintah dengan menambah variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Internal.

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah".

Kajian Teori

1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

a. Pengertian SAP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Adapun definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Bastian (2010:137) yaitu: "Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sehingga SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia."

b. Tujuan SAP

Standar Akuntansi Pemerintah bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan berjalan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat untuk dipertanggung jawabkan. Standar akuntansi diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Apabila tidak ada standar akuntansi

yang memadai dapat menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam proses pemeriksaan (Mardiasmo. 2004: 149).

c. Jenis SAP

Menurut Rahayu, dkk (2014) Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mempunyai pilihan dua basis yaitu :

1) SAP berbasis akrual

Penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Melalui SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik. . Suatu pemerintahan yang menerapkan SAP akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam lingkungan pemerintahan.

2) SAP berbasis kas menuju akrual

SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

a. Pengertian SAKD

Menurut Mardiasmo (2004: 147) Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Akuntansi keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu prinsip, metode, dan teknik pencatatan dan pengorganisasian data keuangan atas kegiatan suatu entitas untuk menghasilkan dan memberikan informasi, sehingga digunakan sebagai

dasar pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri no.59 Tahun 2007).

b. Aturan dasar Sistem Akuntansi Keuangan

Menurut Masisi (1978) dalam mardiasmo (2004) menjelaskan aturan dasar sistem akuntansi keuangan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi kegiatan operasi yang relevan.
- 2) Pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat.
- 3) Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas.
- 4) Menghitung pengaruh masing-masing operasi.

3. Kompetensi Sumber daya manusia

a. Pengertian Kompetensi SDM

Kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berfikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang (Moehersono. 2012:5). Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati (Andini dan Yusrawati. 2015). Kompetensi Sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang dalam suatu organisasi atau suatu sistem untuk melakukan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Ihsanti, 2014).

b. Tujuan Kompetensi SDM

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu pengelolaan sumber daya

manusia dilakukan sebaik mungkin agar memberikan kontribusi secara optimal sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia sebagai pilar penyangga utama dan penggerak roda suatu organisasi untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi yang akan dicapai (Yosefrinaldi, 2013).

c. Langkah-langkah meningkatkan Kompetensi SDM

Menurut Uha, Ismail (2014: 131) Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan formal PNS menuju pengembangan pembangunan dan membangun wawasan keilmuan.
- 2) Mengoptimalkan diklat dan peningkatann bintek untuk mewujudkan kompetensi dan keterampilan teknis.
- 3) Penyusunan standar kompetensi jabatan dalam menempatkan aparatur sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 4) Pembinaan karier PNS yang terstruktur, profesional, dengan pola pikir general dan kerja secara spesial dalam riil produksi.
- 5) Pengembangan jabatan fungsional menuju spesialisasi dengan kebutuhan tuntutan kerja.

4. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

a. Pengertian SPI

Menurut Purwono (2004: 121) Pengendalian internal pemerintah merupakan segenap rencana, metode serta kebijakan yang terkoordinasi dalam suatu entitas bertujuan mengamankan harta yang dimiliki serta menguji ketepatan dan keakuratan data akuntansi.

b. Tujuan pengendalian internal

Menurut Mardi (2014) sesuai dengan definisi AICPA pengendalian internal mempunyai beberapa tujuan yaitu:

- 1) Menjaga harta kekayaan milik instansi.
- 2) Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi.
- 3) Meningkatkan efisiensi operasional.
- 4) Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan.

c. Manfaat SPI

Sistem pengendalian digunakan untuk pengendalian dalam akuntansi keuangan, dan memberikan jaminan terlaksananya strategi yang direncanakan pada instansi secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan laporan keuangan yang baik. Adanya sistem pengendalian intern yang optimal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas guna meminimalkan resiko dan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Harnoni. 2016).

Sistem pengendalian internal yang baik dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang dianggap layak, dan apabila terjadi kesalahan akan segera diketahui dan diatasi secara cepat. Sistem pengendalian internal yang baik harus didukung oleh sistem dan prosedur yang memadai, tenaga pelaksana yang memiliki integritas dan memenuhi kualifikasi profesi, dan adanya pemisahan tugas yang jelas setiap bidang kegiatan. Melakukan evaluasi terhadap rancangan dan menguji ketaatan dalam pelaksanaan struktur pengendalian internal adalah cara untuk mengetahui seberapa jauh pengendalian tersebut dilaksanakan (Purwono. 2004: 125).

d. Unsur-unsur SPI

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah terdiri atas unsur:

- 1) Lingkungan pengendalian.
- 2) Penilaian resiko.
- 3) Kegiatan pengendalian.
- 4) Informasi dan komunikasi.
- 5) Pemantauan pengendalian internal.

5. Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah

a. Pengertian Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan menyajikan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja dari program dan kegiatan; realisasi

dari pencapaian target pendapatan, penyerapan belanja, dan pembiayaan (Bastian. 2010: 97).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Informasi laporan keuangan dikatakan berkualitas dan bermanfaat apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain :

- 1) Relevan: apabila informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau sekarang serta memprediksi masa depan dan mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki karakteristik:
 - a) Manfaat umpan balik (*feedback value*)
 - b) Manfaat prediktif (*redictive value*)
 - c) Tepat waktu (*timeliness*)
 - d) Lengkap
- 2) Andal: informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memiliki karakteristik berikut :
 - a) Penyajian jujur
 - b) Dapat diverifikasi
 - c) Netralitas
- 3) Dapat dibandingkan: Informasi pada laporan keuangan lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya.
- 4) Dapat dipahami: Informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan oleh pengguna.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Halim (2002: 159) secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah memberikan informasi keuangan terhadap:

1) Akuntabilitas

Yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan kepada unit organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.

2) Manajerial

Yaitu menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan

keuangan pemerintah dan memudahkan pengendalian yang efektif atas aset, hutang dan ekuitas dana.

3) Transparasi

Yaitu menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

c. Komponen laporan keuangan

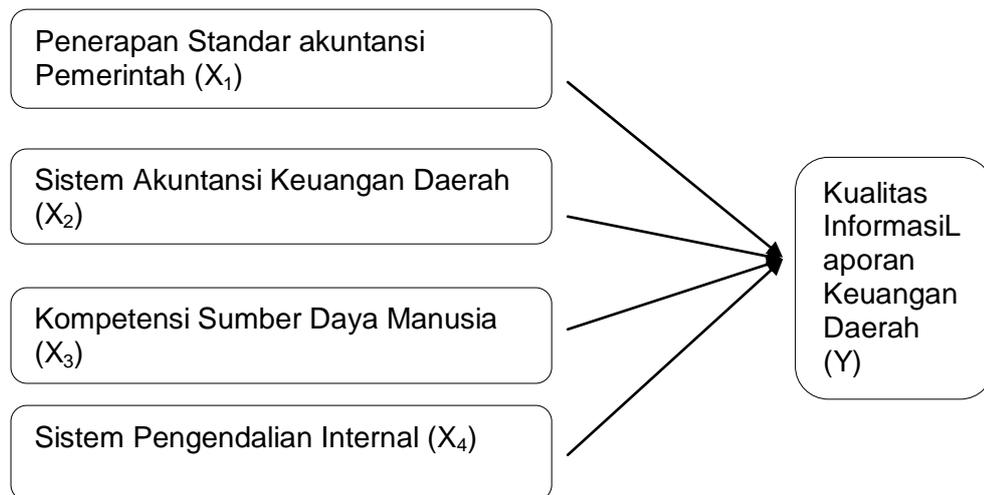
Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Laporan keuangan pemerintahan terdiri atas:

1) Laporan Realisasi Anggaran:

2) Neraca

3) Laporan Arus Kas

4) Catatan atas Laporan Keuangan



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh pada kualitas informasi laporan keuangan daerah.

H₂ : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh pada kualitas Informasi laporan keuangan daerah

H₃ : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh pada Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah

H₄: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh pada Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 6 bulan mulai bulan September 2016 sampai dengan Maret 2017. Lokasi penelitian adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Bantul.

B. Metode Penentuan Subjek

1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah Seluruh SKPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bantul.

2. Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah 20 SKPD Kabupaten Bantul. Metode pemilihan sampel menggunakan *Purposive sampling*. Kriteria-kriteria dalam pemilihan sampel yaitu SKPD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, SKPD yang memiliki bagian keuangan atau akuntansi terdiri dari kepala bagian akuntansi/penatausahaan keuangan, kepala seksi dan staf yang minimal menjabat 1 tahun dan SKPD tersebut menggunakan sistem akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan.

C. Variabel/ Parameter Penelitian

Variabel penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal. Sedangkan variabel dependen adalah Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah. Adapun Definisi Operasional variabel independen dan dependen adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Variabel Dependen penelitian ini adalah kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Definisi operasional kualitas informasi laporan keuangan menurut peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Instrumen yang digunakan terdiri dari 9 item pertanyaan yang disusun oleh Nurlaila (2013). Skala yang digunakan adalah skala *likert* yaitu mulai skor 1 (sangat tidak setuju) sampai skor 5 (sangat setuju). Semakin tinggi skor yang diperoleh berarti informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD merupakan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

2. Variabel Independen

a. Penerapan SAP

Menurut Susi dan Riana (2014) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat. Menurut PP

No. 71 Tahun 2010 terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan pemerintah yaitu: basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, perioditas, konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar. Instrumen yang digunakan terdiri dari 9 item pertanyaan yang disusun oleh Nurlaila (2013). Skala yang digunakan adalah skala *likert* yaitu mulai skor 1 (sangat tidak setuju) sampai skor 5 (sangat setuju). Semakin tinggi skor yang diperoleh berarti informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD merupakan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

b. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)

Sistem Akuntansi Keuangan adalah suatu sistem informasi yang menggabungkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga menghasilkan informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah menggunakan Kebijakan Akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Instrumen yang digunakan terdiri dari 8 item pertanyaan yang disusun oleh Hidayat (2015). Skala yang digunakan adalah skala *likert* yaitu mulai skor 1 (sangat tidak setuju) sampai skor 5 (sangat setuju). Semakin tinggi skor yang diperoleh berarti informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD merupakan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

c. Kompetensi SDM (X_3)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai manusia yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri.

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Ariesta, 2013). Instrumen yang digunakan terdiri dari 15 item pertanyaan yang disusun oleh Sudiaranti (2014). Skala yang digunakan adalah skala *likert* yaitu mulai skor 1 (sangat tidak setuju) sampai skor 5 (sangat setuju). Semakin tinggi skor yang diperoleh berarti informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD merupakan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

d. Sistem Pengendalian Internal (X₄)

Sistem Pengendalian Intern adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Yosefrinaldi, 2013). Pengukuran variabel Sistem Pengendalian Internal menggunakan instrumen kuisisioner yang terdiri dari 4 indikator yang bersumber pada PP No. 60 Tahun 2008 yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Instrumen yang digunakan terdiri dari 9 item pertanyaan yang disusun oleh Soimah (2014). Skala yang digunakan adalah skala *likert* yaitu mulai skor 1 (sangat tidak setuju) sampai skor 5 (sangat setuju). Semakin tinggi skor yang diperoleh berarti informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD merupakan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

metode angket (kuesioner) dan wawancara. Metode angket menggunakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Kuesioner penelitian di bagikan pada bagian keuangan setiap SKPD di Kabupaten Bantul dengan cara di distribusikan langsung. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang SKPD.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner. Pertanyaan untuk variabel kualitas informasi laporan keuangan dan standar akuntansi pemerintah mengacu pada instrumen penelitian Nurlaila (2014). Pertanyaan untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan instrumen yang disusun oleh Hidayat (2015). Pertanyaan untuk variabel Kompetensi sumber daya manusia mengacu pada instrumen penelitian Sudiaranti (2014). Sedangkan pertanyaan untuk variabel sistem pengendalian internal mengacu pada instrumen penelitian Soimah (2014). Masing-masing variabel pada instrumen penelitian memiliki *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6 sehingga instrumen penelitian yang digunakan merupakan instrumen yang reliabel (dapat dipercaya).

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas dan Uji Reabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuisisioner. Teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas adalah menggunakan koefisien korelasi. Data dikatakan valid apabila korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruksinya signifikan pada level 0,05 atau 0,01 maka pertanyaan tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2011).

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2009), reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali pada subjek yang sama. Untuk menguji reliabilitas kuisisioner digunakan teknik *Cronbach*

Aplha. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel apabila *cronbach* memberikan nilai di atas 0,06.

2. Model Penelitian

Model penelitian regresi dipilih untuk menganalisis hubungan antara yang digunakan antara variabel dependen (kualitas informasi laporan keuangan daerah) dengan variabel independen (standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi SDM, dan sistem pengendalian internal). Adapun model penelitian sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = variabel terikat (kualitas laporan keuangan daerah)

α = konstanta

β = koefisien regresi

x_1 = SAP

x_2 = SAKD

x_3 = Kompetensi SDM

x_4 = sistem pengendalian internal

ϵ = kesalahan residual

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin kecil nilai R^2 maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas, begitu juga sebaliknya (Ghozali, 2011).

b. Uji F

Pengujian model regresi menggunakan Uji F dan pengujian

koefisien determinasi. Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Syarat nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05 (5%) maka hipotesis diterima atau dengan $\alpha = 5\%$ variabel independen secara statis mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama (simultan).

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan uji t . Uji statistik t digunakan untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memproduksi. Dasar pengambilan keputusan adalah menggunakan angka probabilitas signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima (Ghozali, 2011). Uji signifikansi- t dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (5%). Jika *probability value* $< 0,05$ maka H_a diterima yang berarti bahwa variabel independen tersebut berhubungan secara statis terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika *probability value* $> 0,05$ maka H_a ditolak yang berarti variabel independen tidak berhubungan secara statis terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek penelitian pada SKPD Kabupaten Bantul yang terdiri dari 20 SKPD. Responden penelitian ini adalah karyawan di SKPD Kabupaten Bantul yang meliputi bagian keuangan, kepala seksi, dan staf bagian keuangan. Data penelitian dikumpulkan dengan mengirimkan sebanyak 105 kuisisioner dan hanya diperoleh 82 lembar kuisisioner. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Kuisisioner Penelitian

Keterangan	Jumlah	Prosentase
Kuisisioner yang disebar	105	105 %
Kuisisioner yang tidak kembali	23	21,9 %
Kuisisioner yang tidak diisi lengkap	0	0%
Kuisisioner yang dapat diolah	82	78,1 %

Sumber: data primer diolah tahun 2017

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		t	Probabilitas (Sig.t)
	Koefisien	Kesalahan Standar		
Konstanta	9,546	2,823	3,381	0,001
Standar Akuntansi Pemerintah	0,469	0,089	5,291	0,000
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,073	0,111	0,661	0,511
Kompetensi SDM	0,045	0,044	1,015	0,313
Sistem Pengendalian Internal	0,153	0,119	1,288	0,202
R Square	0,785	Adjusted R Square		0,596
F Hitung	30,813	Sig.		0,000
Std. Error of Estimate				2.131

sumber: data primer diolah tahun 2017.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas (standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal) terhadap variabel terikat (kualitas informasi laporan keuangan daerah). Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh rumus sebagai berikut:

$$Y = 9,546 + 0,469x_1 + 0,073x_2 + 0,045x_3 + 0,153x_4 + \epsilon$$

1) Konstanta

Jika semua variabel bebas memiliki nilai 0 (nol) maka nilai variabel terikat sebesar 9,546. Nilai tersebut terdapat pada kolom beta.

2) Standar akuntansi pemerintah

Nilai koefisien untuk variabel standar akuntansi pemerintah 0469. Setiap kenaikan satu variabel tersebut, variabel dependen (Y) akan naik sebesar 0,469 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

3) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Nilai Koefisien untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah 0,073. Setiap kenaikan satu variabel tersebut, variabel dependen (Y) akan naik sebesar 0,073 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4) Kompetensi sumber daya manusia

Nilai Koefisien untuk variabel kompetensi SDM 0,045. Setiap kenaikan satu variabel tersebut, variabel dependen (Y) akan naik sebesar 0,045 dengan asumsi bahwa

variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

5) Sistem Pengendalian Internal

Nilai Koefisien untuk variabel sistem pengendalian internal 0,153. Setiap kenaikan satu variabel tersebut, variabel dependen (Y) akan naik sebesar 0,153 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

a) Koefisien Determinasi

Nilai *Adjusted R Square* 0,596 (59,6%) yang menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 59,6%, sedangkan yang 40,4% sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini (tidak diteliti). Hasil uji koefisien determinasi tersebut memberikan makna, bahwa masih terdapat variabel independen lain yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan daerah, sehingga perlu pengembangan penelitian lebih lanjut terkait dengan topik ini. *Standard Error of Estimate* (SEE) sebesar 2,131 kesalahan dalam kualitas informasi laporan keuangan daerah sebesar 2,131.

b) UJI F

Tabel 13 menunjukkan nilai F sebesar 30,813 dan signifikansi pada alpha 5 % artinya ada hubungan linear antara variabel independen (standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal) dengan

variabel dependen (kualitas informasi laporan keuangan daerah). Sehingga model penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi kualitas informasi laporan keuangan.

c) Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas (sig.t) variabel standar akuntansi pemerintah sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas (sig.t) variabel ini lebih kecil dari 0,05 (5%). Hasil ini mendukung penelitian Rahayu, dkk (2014) yang menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintah berperan penting pada Kualitas informasi laporan keuangan daerah. Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Wati, dkk (2014) bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah yang menyebutkan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan, maka akan terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan, sehingga standar akuntansi keuangan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Apabila suatu instansi menerapkan standar akuntansi pemerintahan dengan baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya serta dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2004).

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah Kabupaten Bantul dengan nilai probabilitas (sig.t) sebesar 0,511, sehingga menunjukkan bahwa probabilitas (sig.t) variabel ini lebih besar dari 0,05 (5%). Hal ini menggambarkan bahwa SKPD di Kabupaten Bantul belum menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah dalam membuat laporan keuangan

daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ihsanti (2014) yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah. Namun tidak sejalan dengan penelitian Rahayu, dkk (2014) yang menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Kualitas informasi akuntansi keuangan daerah yang relevan, handal, mudah dipahami dan dapat dipercaya dipengaruhi oleh sistem yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Penerapan sistem akuntansi yang lemah akan menyebabkan kualitas informasi akuntansi keuangan yang dihasilkan kurang relevan untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan penelitian pada kabupaten Bantul menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena sistem akuntansi keuangan yang digunakan belum optimal, dalam hal proses pencatatan belum sepenuhnya dicatat berdasarkan kronologis yang terjadi. Hal tersebut mengakibatkan sistem akuntansi keuangan yang dilakukan kurang dioptimalkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah Kabupaten Bantul. Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas (sig.t) variabel kompetensi SDM sebesar 0,313. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas (sig.t) variabel ini lebih besar dari 0,05 (5%). Hal ini menggambarkan bahwa SKPD di Kabupaten Bantul belum memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam membuat laporan keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan jumlah dan kompetensi SDM pengelola keuangan yang belum sesuai dengan kebutuhan. Selain itu SDM pengelola keuangan belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pengelolaan keuangan khususnya penyusunan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena walaupun berbagai pelatihan maupun sosialisasi telah dilakukan namun pengelola keuangan

yang telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi telah dimutasi. Dari data demografi responden didapati SDM yang menempati posisi pengelola keuangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi hanya sebesar 18,3% dan 81,7% berlatar belakang pendidikan selain akuntansi. Penelitian ini sejalan penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2013), yang menemukan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wati, dkk (2014) dan Rahayu, dkk (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah.

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah Kabupaten Bantul. Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas (sig.t) variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,202. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas (sig.t) variabel ini lebih besar dari 0,05 (5%). Hal ini menggambarkan bahwa SKPD di

Kabupaten Bantul belum menerapkan sistem pengendalian internal secara optimal dalam membuat laporan keuangan daerah. Penelitian ini didukung oleh penelitian Yensi, dkk (2014), yang menemukan pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sejalan dengan masih banyaknya temuan BPK atas lemahnya sistem pengendalian intern yang mengakibatkan kebocoran dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga BPK memberi opini Tidak Wajar (TW) bahkan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas sebagian besar LKPD di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian pada SKPD kabupaten Bantul menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini kemungkinan terjadi karena sistem pengendalian internal yang diterapkan belum maksimal, yaitu pada belum semua pemimpin SKPD melakukan pemeriksaan untuk catatan akuntansi secara maksimal.

sebesar 0,313 yang artinya Kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah. Hal ini disebabkan sebagian besar pegawai SKPD tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, sehingga kurang maksimal dalam membuat informasi laporan keuangan yang berkualitas.

Hipotesis 4 menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah yang dibuktikan dengan hasil uji statistik t sebesar 0,202. Hal ini disebabkan kurang optimalnya sistem pengendalian internal yang menyebabkan kurang berkualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan pada SKPD di Kabupaten Bantul.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa penerapan SAP, Sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pengujian hipotesis 1 menggunakan uji statistik t dengan hasil standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah sudah diterapkan dengan baik pada pemerintah daerah Kabupaten Bantul, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

Hasil pengujian Hipotesis 2 yaitu sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah, dengan hasil uji statistik t sebesar 0,511. Hal ini karena sistem akuntansi keuangan dianggap tidak mudah digunakan sehingga kurang mendukung dalam hal pemrosesan data-data yang diinput.

Hasil Uji t pada hipotesis 3 yaitu kompetensi SDM dengan nilai diatas 0,05

daya manusia, dan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pemerintahan belum sepenuhnya dilakukan, sehingga hal ini berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah sebaiknya melakukan perbaikan melalui sistem akuntansi keuangan daerah yang di terapkan, kompetensi sumber daya manusia yang memadai, dan sistem pengendalian internal yang optimal pada pembuatan laporan keuangan agar berkualitas.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan. Penelitian ini hanya meneliti pada penerapan SAP, Sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh.

C. Tindak Lanjut

Penelitian ini menguji tentang penerapan SAP, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi SDM dan sistem pengendalian pada kualitas informasi laporan keuangan daerah. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini merupakan faktor dari sisi internal SKPD, sehingga penelitian dapat ditindak lanjuti dengan menguji faktor eksternal SKPD seperti perkembangan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Dewi dan Yusrawati. 2015. *"Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah"*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol 24, No.1
- Ariesta, Fadila. 2013. *"Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai*

Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Pasaman Barat)". Artikel Ilmiah, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

- Bastian, Indra. 2010. *"Sistem Informasi Sektor Publik"*. Jakarta: Badan Penerbit Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Multivariatif dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , Ghozali. 2009. *Aplikasi Multivariatif dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2002. *"Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah"*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Harnoni. 2016. *"Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah"*. JOM FEKON, Vol 3, No.1.
- Hidayat, Rahmad. 2015. *"Pengaruh Pengelola Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Padang Pariaman)"*. Artikel Ilmiah, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Ihsanti, Emilda. 2014. *"Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)"*. Artikel Ilmiah, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Mardi. 2014. *" Sistem Informasi Akuntansi"*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2004. *"Akuntansi Sektor Publik"*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Moeheriono. 2012. *"Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi"*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nurillah, As Syifa dan Muid, Dul. 2014. *"Pengaruh Kompetensi Sumber Daya*

- Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". Skripsi. Semarang: Program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Nurlaila. 2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Enrekang). Skripsi. Makasar: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2005. Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 16 Tahun 2006. Pedoman dalam Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 59 Tahun 2007. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Purwono, Edi. 2004. "Aspek- Aspek EDP Audit Pengendalian Internal pada Komputerisasi". Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Rahayu, Liza, Kennedy, Anisma, Yuneita. 2014. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". JOM FEKON, Vol I, No.2.
- Soimah, Siti. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Skripsi. Bengkulu: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu.
- Sudiaranti. 2014. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". Thesis. Bali: Program PascaSarjana Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Susilawati dan Riana, Dwi .S. 2015. "Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Daerah". STAR- Study & Accounting Research, Vol XI, No.1.
- Uha, Ismail, N. 2014. "Manajemen Perubahan: Teori dan Aplikasi pada Organisasi Publik dan Bisnis". Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wati, Desiana, Herawati, Trisna dan Sinarwati . 2014. "Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". E-Jurnal S1 Akuntansi, Vol II, No.1.
- Winidyaningrum, Celviana dan Rahmawati . 2010. "Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi". Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Yosefrinaldi. 2013. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat)". Jurnal Akuntansi, Volume 1, No. 1.